

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KUALITAS AUDIT,
KOMITE AUDIT DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN
TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR TAHUN 2015-2017**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh:

MUHAMMAD TAUFAN

NIM : 2017340858

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2019

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Muhammad Taufan
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 25 September 1995
N.I.M : 2017340858
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Audit Perpajakan
Judul : Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit,
Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen
Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan
Manufaktur Tahun 2015-2017.

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,

Tanggal :



(Titis Puspitaningrum Dewi Kartika, S.Pd., MSA)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi,

Tanggal :



(Dr. Nanang Shonhadji, S.E., AK., M.Si., CA., CIBA., CMA)

THE EFFECT OF INSTITUTIONAL OWNERSHIP, AUDIT QUALITY, AUDIT COMMITTEE AND BOARD OF INDEPENDENT COMMISSIONER TOWARDS THE TAX AVOIDANCE IN MANUFACTURING COMPANIES ON THE PERIODES 2015-2017

Muhammad Taufan
STIE PERBANAS SURABAYA
Email: mhmdtaufan1@gmail.com
Jl. Medokan Semampir Indah No.75 Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the influence of corporate governance towards the tax avoidance of manufacturing companies. Corporate governance was identified by the institutional ownership, audit quality, audit committee and board of independent commissioner. Tax avoidance is the legal usage of the tax to reduce the amount of the tax that is payable by means that are within the law. This research used 197 companies as a sample from a population of 438 companies in manufacturing on Indonesian Stock Exchange in the periode of 2015-2017. Analysis tool that have been used was multiple linier regression analysis by using SPSS 23 program. The results showed that corporate governance mechanisms proxied by the audit quality have effect to the tax avoidance of the firm, while institutional ownership, audit committee and board of independent commissioner have not effect to the tax avoidance.

Keywords: Corporate governance, institutional ownership, audit quality, audit committee, board of independent commissioner and tax avoidance.

Latar Belakang

Pajak merupakan denyut nadi pembangunan suatu negara. Pembangunan nasional membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), hampir 80% pendapatan APBN bersumber dari penerimaan pajak. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Sebaliknya, bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba sebelum pajak. Dengan demikian, perusahaan sering kali berupaya untuk melakukan pembayaran pajak seminimal mungkin.

Pendapatan Negara dari sektor pajak diharapkan dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini mendorong peluang yang terbuka lebar untuk terus ditingkatkan di masa yang akan datang karena potensinya belum digali secara optimal. Berdasarkan data, anggaran penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak masih kurang relevan, dimana dalam kurun waktu

lima tahun kebelakang penerimaan pajak masih bersifat fluktuatif bahkan cenderung mengalami penurunan.

Sehubungan dengan upaya untuk menggali penerimaan Negara dari sektor perpajakan, maka diterapkan langkah-langkah nyata dan diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia. Melalui perbaikan dan penyempurnaan peraturan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui pembayaran pajak, akan tetapi di lain sisi, banyak Wajib Pajak yang masih menganggap pajak sebagai beban.

Pajak merupakan beban bagi perusahaan yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2008:1). Wajib pajak akan cenderung mencari cara untuk memperkecil pajak yang mereka bayar, baik itu secara legal maupun ilegal. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih ada di dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Terdapat beberapa penelitian terkait dengan *tax avoidance*, yang menyatakan beberapa faktor penting mengapa sebuah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Li (2015) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional, kualitas

audit, komite audit dan dewan komisaris independen.

Faktor pertama adalah kepemilikan institusional yang merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank (Dewa dan Jati, 2014). Karena adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

Selain itu, faktor kualitas audit juga menjadi salah satu faktor penting dalam mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena kualitas audit merupakan indikator utama yang digunakan dalam memilih auditor. Dengan maksud bahwa pertimbangan utama dalam memilih auditor adalah tergantung dari pelayanan jasa auditor yang diberikan kepada klien.

Salah satu karakteristik *Corporate Governance* (GC) yang harus dimiliki perusahaan adalah komisaris independen yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan, membantu pengelolaan perusahaan yang baik dan membuat laporan keuangan lebih objektif. Dengan adanya komisaris independen didalam perusahaan diharapkan dapat meminimalisir kecurangan yang mungkin terjadi dari pelaporan perpajakan yang dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan.

Keberadaan komite audit didalam perusahaan dapat memberikan peran mendukung dewan komisaris dalam memonitor manajemen menyusun laporan

keuangan perusahaan dapat juga mempengaruhi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Penelitian ini penting dilakukan karena adanya fenomena atas praktik *Tax Avoidance* yang terjadi pada perusahaan manufaktur yang ada, selain itu juga karena adanya ketidak konsistenan hasil atau *research gap* pada penelitian terdahulu. Berkembang pesatnya perusahaan manufaktur yang ada dan menjadi perputaran uang yang ada di dunia menjadikan perusahaan sektor manufaktur dijadikan sebagai sampel penelitian. Penelitian *tax avoidance* ini menarik untuk dijadikan penelitian melihat banyak fenomena, *research gap* dan keterkaitan teori. Berdasarkan ulasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KUALITAS AUDIT, KOMITE AUDIT DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR PADA BEI TAHUN 2015-2017”.

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (Agency Theory)

Penelitian ini menggunakan teori dasar yaitu keagenan atau *agency theory*. *Agency theory* adalah teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976). *Agency theory* menjelaskan hubungan antara prinsipal yaitu pemegang saham dan agen yaitu manajemen perusahaan. Pemegang saham tidak terlibat langsung dalam

aktivitas operasional perusahaan. Aktivitas operasional perusahaan dijalankan oleh pihak manajemen. Pihak manajemen berkewajiban mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan dan juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya.

Tax Avoidance

Penghindaran pajak sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban. Dyreng, et al (2008) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak. Penghindaran pajak adalah bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran (Masri, 2013). Ini berbeda dengan *tax evasion* dimana *tax evasion* merupakan penggelapan pajak dan merupakan usaha untuk memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan dan hukum yang berlaku di suatu negara. *Tax evasion* bersifat illegal dan oleh karena itu dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. (Lim, 2010)

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Menurut Brealey, Myers, dan Marcus dalam Fandini (2013) Kepemilikan Institusional adalah beberapa saham dipegang langsung oleh para investor

individu tetapi proposisi yang besar dimiliki oleh lembaga keuangan seperti reksa dana, dana pensiun dan perusahaan asuransi. (Tarjo,2013)

Kualitas Audit

Kepemilikan Kualitas audit adalah karakteristik atau gambaran praktik dan hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Kualitas audit berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah diterapkan. Dalam penerapannya dilapangan, kualitas audit adalah segala kemungkinan (probability) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkan dalam laporan keuangan auditan. (Kadek dan I Gede, 2017)

Komite Audit

Komite Berdasarkan Keputusan Ketap Bapepam Nomor KEP-29/PM/2004 tanggal 24 September, perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa jumlah komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk ketua komite audit. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi. Salah seorang anggota memiliki latar belakang keahlian akuntansi dan atau

keuangan. Anggota komite audit harus berasal dari pihak eksternal yang independen. Pihak eksternal yang dimaksudkan yaitu pihak di luar perusahaan yang bukan merupakan komisaris, direksi dan karyawan. Independen berarti tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, komisaris, direksi dan pemegang saham utama. (Dzurroh, 2017)

Dewan Komisaris Independen

Kepemilikan Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris dan direksi. Kepengurusan perseroan menganut sistem dua beban (two boards system), yaitu dewan komisaris dan direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana dimanfaatkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Menjelaskan kembali bahwa pada perseroan terbatas tugas dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya kepengurusan, dan memberikan nasihat kepada direktur untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, dewan komisaris harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan mempertahankan independensinya (Diana dan Nurul 2017).

Hubungan Antar Variabel Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan saham oleh pihak institusional dapat memainkan peran penting dalam melakukan pemantauan, mendisiplinkan, dan mempengaruhi pihak manajer. Apabila terdapat kepemilikan saham oleh pihak institusional di suatu perusahaan akan dapat mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Kepemilikan institusional dapat dijadikan sebagai mekanisme monitoring yang efektif dalam membuat dan pengambilan sebuah keputusan oleh pihak manajer didalam perusahaan.

H1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap tax avoidance.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance

Kualitas audit adalah kerangka dasar dalam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan bagi pengguna informasi tersebut (Fairchild, 2008). Dalam kaitannya dengan pajak perusahaan, perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak secara agresif untuk menghindari adanya pelaporan pajak yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, untuk menjamin kualitas informasi dalam kaitannya dengan perpajakan maka dibutuhkan auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan agar terjamin realibilitas informasi.

Dalam kaitannya dengan hubungan antara kualitas audit terkait dengan teori agensi yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini yaitu adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen terkait pemilihan audit eksternal. Dimana pemegang saham

menginginkan laporan keuangan perusahaan di audit oleh KAP yang berafiliasi Big Four karena untuk mendukung kredibilitas laporan keuangan, sementara manajemen menginginkan laporan keuangan di audit oleh KAP yang Non Big Four karena untuk menghasikan opini wajar tanpa pengecualian.

H2 : Kualitas Audit berpengaruh terhadap tax avoidance

Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan Komite audit bertugas melakukan pengawasan terhadap auditor internal dan eksternal serta memastikan bahwa manajemen mengambil tindakan perbaikan yang diperluakan secara tepat waktu untuk mengatasi kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap kebijakan, hukum dan ketentuan yang berlaku (Hanggraeni, 2015). Peran komite audit yang baik diduga dapat mendorong ketaatan perusahaan sebagai wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara layak. Jika perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak, hal tersebut mencerminkan kekurangefektifan peran komite audit pada perusahaan

Dalam kaitannya dengan hubungan antara komite audit terkait dengan teori agensi yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini yaitu adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen terkait komite audit. Dimana pemegang saham menginginkan bahwa komite audit (audit internal) pada perusahaan minimal sebanyak 3 (tiga orang) untuk mencegah tindakan

kecurangan audit, sementara manajemen menginginkan komite audit tidak lebih dari 3 (tiga orang) untuk mengaudit laporan keuangan internal..

H3 : Komite Audit berpengaruh terhadap tax avoidance

Pengaruh Ukuran Perusahaan dengan Nilai Perusahaan

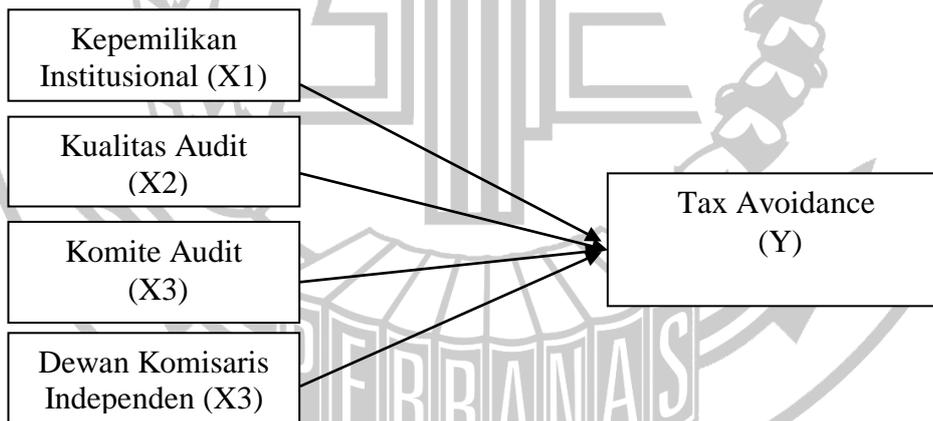
Keberadaan Tugas komisaris independen dalam memastikan prinsip-prinsip dan praktik GCG dipatuhi dan diterapkan dengan baik, antara lain menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, kepatuhan perusahaan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, serta

menjamin akuntabilitas program perseroan (Effendi, 2016).

Komisaris independen hendaknya dapat berperan secara efektif untuk melakukan deteksi dini (*early warning*) terhadap adanya potensi penghindaran pajak. Bentuk keefektifan peran komisaris independen salah satunya adalah perusahaan melaksanakan kewajibannya secara utuh termasuk kewajiban perpajakan. Dengan demikian, semakin besar proporsi komisaris independen diharapkan perusahaan tersebut semakin tidak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

H4 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap tax avoidance.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Klasifikasi Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017. Sampel yang digunakan adalah laporan

keuangan perusahaan manufaktur dari tahun 2015-2017. Teknik pengambilan sampel adalah dengan metode purposive sampling.

Jenis Data

Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang

bersumber pada laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan tahun 2015-2017. Strategi pengumpulan data dalam penelitian ini adalah strategi arsip, yang datanya dikumpulkan berasal dari catatan atau basis data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data dari basis data (Jogiyanto, 2016). Data mengenai variabel independen yang digunakan dapat diperoleh dari situs web resmi Bursa Efek Indonesia atau melalui website resmi dari perusahaan manufaktur terkait.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian saat ini meliputi variabel dependen yaitu Tax Avoidance dan variabel independen yang terdiri dari, kepemilikan institusional, kualitas audit, komite audit dan dewan komisaris independen.

Definisi Operasional Variabel

Tax Avoidance

Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Mardiasmo, 2011:9) rumus rasionya adalah:

$$CETR = \frac{\text{Laba Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau bank, kecuali kepemilikan individual investor. (Annisa dan Lulus, 2012).

$$KI = \frac{\text{Jumlah Shm Inst}}{\text{Total Shm Beredar}}$$

Kualitas Audit

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi ketika auditor mengaudit laporan keuangan auditee dan apabila menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati, 2014)

1 = KAP BIG FOUR

0 = KAP NON BIG FOUR

Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit adalah salah satu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan. (Budi Setyoko 2017) yaitu :

$$KMA = \frac{\text{Jmh ang kom audit}}{\text{Jmh Sel Anggota}}$$

Dewan Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komasisris yang berasal dari luar perusahaan. Kedudukan komisaris independen pada dasarnya sama dengan anggota dewan komisaris lainnya, yakni sebagai badan pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi (Rahmat dalam Diana, 2017)

$$DKI = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Dewan Komisaris}}$$

ALAT ANALISIS

Analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen (Imam Ghozali, 2011 : 95). Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, kebijakan utang, ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Adapun model regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e_i$$

Keterangan :

Y = Tax Avoidance

a = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

X1 = Kepemilikan Institusional

X2 = Kualitas Audit

X3 = Komite Audit

X4 = Dewan Komisaris Independen

e_i = eror

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Deskriptif

Analisis deskriptif adalah metode menganalisis data kuantitatif sehingga memperoleh gambaran atau deskripsi suatu data (Imam Ghozali, 2011 : 19). Analisis deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran tentang variabel dependen dan variabel independen pada penelitian ini. Dimana variabel dependen meliputi kepemilikan institusional, kualitas audit, komite audit dan dewan komisaris independen terhadap tax avoidance.

Tabel 1

TABEL HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	374	,103	,744	,28750	,10051
KEP INST	374	,100	,988	,36870	,21936
KA	374	,000	1,000	,48930	,49988
KMA	374	,020	,050	,93316	,24975
KOMID	374	,200	,800	,40311	,10861
Valid N (listwise)	374				

Sumber: Data Olahan SPSS, Lampiran

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa data penelitian ini sebanyak 374 data. Nilai minimum tax avoidance sebesar 0,103 yang dimiliki oleh Bentoel Internasional Investama Tbk pada tahun 2015, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut menunjukkan bahwa adanya penghematan pajak pada tahun 2014 ke tahun 2015. Nilai maksimum sebesar 0,744 yang dimiliki oleh perusahaan PT. Steel Pipe Industry of

Indonesia Tbk pada tahun 2015 yang menunjukkan bahwa terdapat nilai pajak kini lebih besar dari pajak yang dibayarkan. Nilai dari rata-rata (*mean*) menunjukkan angka 0,28750 artinya rata-rata perusahaan manufaktur mempunyai tax avoidance sebesar 0,10051.

Berdasarkan Tabel 1 nilai minimum kepemilikan institusional sebesar 0,100 yang dimiliki oleh beberapa perusahaan yang salah

satunya, PT. Holcim Indonesia Tbk tahun 2016 yang menunjukkan bahwa nilai terendah dari data yang di input adalah 0,1 persen. Hal ini menunjukkan terdapat perusahaan yang memiliki pihak institusional yang berperan pasif dalam menentukan keputusan memiliki saham di dalam perusahaan. Nilai maksimum sebesar 0,988 yang dimiliki oleh PT Panasia Indo Resources Tbk tahun 2016 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut merupakan pihak institusional berperan aktif dalam memiliki saham. Nilai angka *mean* menunjukkan angka 0,36870 artinya pihak institusional yang berperan aktif sebanyak 14%.

Berdasarkan Tabel 1 nilai minimum Kualitas Audit sebesar 0,0000 yang dimiliki oleh beberapa perusahaan yang salah satunya adalah PT Eterindo Wahanatama Tbk tahun 2017, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak menggunakan KAP yang berafiliasi dengan KAP Big Four. Nilai maksimum sebesar 1,000 dimiliki oleh PT. Sekawan Intipratama Tbk

tahun 2016 yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menggunakan KAP Big Four. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,48930 artinya bahwa perusahaan manufaktur yang menggunakan KAP Big Four sebesar 0,49988.

Berdasarkan Tabel 1 nilai minimum komite audit sebesar 0,020 dimiliki oleh PT. Sekawan Intipratama Tbk tahun 2016. Nilai maksimum sebesar 0,050 dimiliki oleh PT. Century Textile Industry (PS) Tbk tahun 2016. Nilai rata-rata perusahaan manufaktur sebesar 0,93316.

Berdasarkan Tabel 1 nilai minimum dewan komisaris independen perusahaan manufaktur sebesar 0,200 yang dimiliki oleh beberapa perusahaan karena beberapa perusahaan tersebut tidak memiliki independen cukup banyak. Nilai maksimum sebesar 0,800 dimiliki oleh PT. Astra International Tbk tahun 2016 yang menunjukkan bahwa memiliki independen sejumlah 8 orang. Nilai rata-rata perusahaan manufaktur adalah sebesar 0,30411.

Hasil Analisis dan Pembahasan

TABEL 2
HASIL ANALISIS REGRESI BERGANDA

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	
1 (Constant)	,183	,036	,000
KEP INST	,011	,035	,756
KA	,023	,011	,050
KMA	,033	,024	,163
KOMID	,072	,050	,152

Sumber: Data Olahan SPSS, Lampiran

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini terlihat dari hasil uji t sebesar 0,311 dengan signifikansi $0,756 > 0,05$. Alasannya karena adanya tidak adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance dapat diidentifikasi bahwa dengan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi tidak dapat menjadi alat untuk penyatu antara pihak manajemen dan pihak pemegang saham. Adanya kepemilikan institusional yang tinggi tidak dapat dijadikan indikator seberapa baik perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Sehingga semakin banyaknya saham yang dimiliki oleh pihak institusional tidak dapat menurunkan nilai tax avoidance.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budi Setyoko (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Namun hasil penelitian ini tidak didukung oleh Diana dan Nurul (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini terlihat dari hasil uji t 1,971 dengan signifikansi $0,050 \leq 0,05$. Alasannya karena adanya pengaruh

kualitas audit terhadap tax avoidance, dengan alasan tersebut menjelaskan bahwa semakin berkualitas KAP atau hasil audit suatu perusahaan menyebabkan pengawasan dalam meningkatkan kredibilitas perusahaan. Tindakan pengawasan KAP juga akan memiliki pengawasan yang lebih ketat atas segala aktivitas yang terjadi pada perusahaan dalam menghindari Tax Avoidance.

Hasil ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bella Fitri Putri Rinjani (2018) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung Rizky dkk (2018) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini terlihat dari hasil uji t 1,399 dengan signifikansi $0,163 > 0,05$. Alasannya karena tidak adanya pengaruh komite audit terhadap tax avoidance dapat diidentifikasi bahwa semakin banyaknya komite audit dalam sebuah perusahaan, tidak akan mempengaruhi tingkat pengawasan dan pemeriksaan bagian-bagian yang bersifat material. Sehingga terdapat celah-celah untuk terjadinya tindak kecurangan.

Hasil ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hendrik E. S Samosir (2017) yang menyatakan komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Namun hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dzurroh (2017) komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tax avoidance tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini terlihat dari hasil uji t 1,439 dengan signifikansi $0,152 > 0,05$. Alasannya karena tidak adanya pengaruh dewan komisaris independen terhadap tax avoidance dapat diidentifikasi bahwa jika suatu perusahaan memiliki dewan komisaris yang memang independen dan mampu menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas yang independen dan tidak terafiliasi dengan berbagai macam bentuk maka akan memperkecil akan resiko terjadinya tax avoidance dan sebaliknya..

Hasil ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budi Setyoko (2017) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Ary (2017) bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

KESIMPULAN KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Hasil pengujian

hipotesis yang diperoleh dalam penelitian adalah, sebagai berikut:

Hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memengaruhi tax avoidance. Hal ini berarti jika kepemilikan institusional tinggi, maka praktik tax avoidance pada perusahaan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan pemegang saham institusional tidak memaksimalkan fungsi-fungsi kepemilikan perusahaan untuk mengontrol perusahaan dengan baik sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penghindaran pajak.

Hasil pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa kualitas audit mempunyai pengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini dikarenakan pemilihan auditor eksternal yang bertugas sebagai pemeriksa laporan keuangan dan pemberian opini terhadap kinerja perusahaan yang secara langsung memberikan citra perusahaan terhadap investor, serta mencegah kecurangan dan kesalahan saji pada laporan keuangan perusahaan. Sehingga pemilihan auditor eksternal yang berkualitas dapat meminimalisir terjadinya praktik tax avoidance.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menyatakan bahwa komite audit tidak mempengaruhi tax avoidance. Hal ini dikarenakan peran, tugas serta wewenang komite audit untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja operasional perusahaan dan penyusunan laporan keuangan tidak berjalan maksimal sebagaimana seharusnya. Sehingga menyebabkan adanya kecurangan ataupun kesalahan saji dalam pelaporan

keuangan dan mengakibatkan terjadinya praktik tax avoidance.

Hasil pengujian hipotesis keempat menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak mempengaruhi tax avoidance. Hal ini dikarenakan peran dari dewan komisaris independen yang dituntut untuk bekerja secara independen dan tidak terafiliasi dengan pemegang saham dan dewan komisaris lainnya tidak berjalan maksimal. Sehingga fungsi pengawasan dan independensi tidak dapat diterapkan yang mengakibatkan terjadinya praktik tax avoidance.

Peneliti telah berusaha untuk merancang dan mengembangkan penelitian dengan sedemikian rupa, namun peneliti menyadari masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan penelitian ini adalah (1) Penelitian ini memiliki beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya masalah heteroskedastisitas diperoleh dari nilai sig salah satu variabel yang masih $< 0,05$. (2) Penelitian ini memiliki masalah uji normalitas data, setelah melakukan uji menggunakan SPSS 23, menunjukkan data tidak normal sehingga sampel yang didapatkan tidak dapat berdistribusi normal.

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan adalah pada penelitian selanjutnya adalah (1) Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan rumus perhitungan penghindaran pajak yang lebih sederhana namun tetap dapat menggambarkan fenomena praktik penghindaran pajak di Indonesia, sehingga menyebabkan sampel yang digunakan menjadi sedikit. (2)

Menggunakan teknik pengambilan purposif sampling agar mendapatkan data yang sesuai.

DAFTAR RUJUKAN

- Andhikari, A., Check, D., & Hao, Z. (2006). Political Connections and Effective Tax rates: Longitudinal Evidence from Malaysia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25: 574-995.
- Agung, P. N. (2017). Koneksi Politik dan Aggresifitas Pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi*.
- Astuti, & Aryani. (2016). Tran Penghindaran pajak perusahaan manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi/Volume XX, No.03*, 375-388.
- Bayu, A. P., & Ari, K. W. (2014). Pengaruh Koneksi Politik dan Corporate governance terhadap tax aggressiveness. *Seminar Nasional dan The 3rd Call For Syariah Paper*.
- Chen, S., Chen, X., & Shelvin, T. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive than Nonfamily. *Journal of Financial Economics*, 41-46.
- Dyreng, S., Hanlon, M., & Meydew, E. (2010). The Effects of Executives on Corporate Tax. *Accounting Review*, 1163–1189.
- Faccio, M. (2006). Politically Connected Firms. *The American Economic Review*, 369-386.
- Fisman, R. (2001). Estimating the Value of Political

- Connections. *American Economic Review*, 1095-1102.
- Frank, M., & S, R. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive. *The Accounting Review*, 467-496.
- Frischman, P., Shevlin, T., & Wilson, R. (2008). Economic Consequences of Increasing the conformity in Accounting for uncertain tax benefits. *Journal of accounting and economics*, 261-278.
- Gomez, E. (2009). The rise and fall of capital : Corporate Malaysia in historical perspective. *Journal of contemporary Asia*, 345-381.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 127-178.
- Hardika, & Nyoman, S. (2007). Perencanaan Pajak : sebagai strategi penghematan pajak. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 103-112.
- Lim, Y. (2011). Tax avoidance, cost of debt and shareholder activism. *Journal of Banking & Finance*, 456-470.
- Nugroho, A. A. (2011). Pengaruh Hubungan Politik dan Reformasi Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2009.
- Nurul, H., & Fidiana. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate governance terhadap penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Purwoto, L. (2011). Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Pemerintah dan Keburaman Laporan Keuangan terhadap kesinkronan dan risiko crash harga saham. *Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Manajemen*.
- Ronald, T., & Ellia, R. (2016). Pengaruh Koneksi Politik dan Kualitas Audit terhadap Praktik Penghindaran Pajak di Lembaga Perbankan. *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC*.
- Titiek, P. A., & Y, A. A. (2016). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi Vol XX*.
- Zhang, H. (n.d.). How Does State Ownership Affect Tax Avoidance? Evidence from. *School of Accountancy*, 2012.